

## DAFTAR PUSTAKA

- AR, Sujono dan Bony, Daniel. 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, A.Z. Abidin dan Hamzah A. 2006. *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Moelyanto. 1995. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada*
- Moelyatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*: PT Bumi Aksara, Jakarta. hal. 10
- Makarao, M. Taufik. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Adtya Bakti.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT.Rafika Aditama.
- Remmelink, Jan. 2003. *“Hukum Pidana”, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.
- Sudarto. 1990. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Purwokerto: F.H. Universitas Jenderal Soedirman.
- Suharto RM. 1991. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjowinoto, Petrus, dkk. 2014. *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang: Hukum Soegijapranata (tidak diterbitkan).

Soesilo. R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No.282, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995, No. 77, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.140. Sekretariat Negara, Jakarta.

Wikipedia. 2017. Lembaga Pemasarakatan, dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasarakatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan) ,diakses pada 28 Oktober 2018

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db611800-6bd1-1bd1-9724-313134333039> ,diakses pada 28 September 2020